

Buletin



Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA



KETUA
Prioritaskan
Keselamatan WNI
di Timur Tengah

Lapas Kelembihan Kapasitas Jadi Sorotan

KORPOLKAM
Terima Aspirasi
Serikat Pekerja
Pos

Nomor 1347/II/VI/2025 Juni 2025



9 772614 339005



Lapas Kelembihan Kapasitas Jadi Sorotan



FOTO: MFN/AHA

Komisi XIII DPR RI mengunjungi lapas di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis (19/6/2025).

Komisi XIII DPR RI menyoroti kondisi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis (19/6).

“Overkapasitas ini sangat memprihatinkan, terutama Lapas yang dihuni oleh warga binaan kasus narkoba. Kami mendapat data bahwa jumlah bandar narkoba mencapai 2.400 orang, pengedar 4.000, dan pemakai hanya 889 orang di Sumatera Selatan,” ungkap Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara.

Ia menyebut, salah satu Lapas perempuan bahkan tercatat mengalami kelebihan kapasitas

hingga 251 persen, dan ada yang mencapai 361 persen.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah telah menyatakan komitmennya menyediakan lahan guna membangun Lapas baru.

“Alhamdulillah sudah disetujui dari Bupati akan memberikan lahan seluas 5–6 hektar untuk bisa mengganti salah satu Lapas yang penuh dengan warga-warga binaan narkoba,” kata Dewi.

Namun, Komisi XIII menilai bahwa solusi jangka pendek seperti pembangunan Lapas baru saja tidak cukup. Perlu ada kebijakan nasional yang lebih menyeluruh, termasuk revisi peraturan seperti KUHP dan UU Narkotika agar pendekatan seperti *restorative justice* dan kerja sosial bagi pengguna narkoba bisa diakomodasi.

“Tidak menutup kemungkinan untuk membuat dasar hukum, baik itu nanti di dalam KUHP ataupun mungkin bisa nanti di dalam UU Narkotika dan Psikotropika. Apakah itu bisa secara bersamaan secara nasional melalui DPR RI bersama pemerintah, tentunya ini untuk bisa mengkaji kembali seperti apa,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

mf/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Prioritaskan Keselamatan WNI di Timur Tengah



Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah terus memantau dan memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik di Iran dan Israel, menyusul eskalasi militer antara kedua negara tersebut. Ia mengatakan keselamatan WNI harus menjadi prioritas.

“Pemerintah harus selalu memastikan keselamatan WNI kita, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak seperti Teheran dan Tel Aviv. Jika evakuasi memungkinkan, perlu ada kerja sama dengan komunitas internasional untuk memfasilitasi hal tersebut,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (16/6). Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri mencatat

ada 386 WNI yang tersebar di 11 kota di Iran. Mayoritas merupakan pelajar di kota Qom dengan jumlah sebanyak 258 orang.

Kemenlu pun melaporkan terdapat 187 WNI yang berada di seluruh wilayah Israel. Sebagian besar dari mereka berada di Aravah di selatan Israel. Sementara itu, sebanyak 42 WNI dilaporkan terjebak di Tel Aviv saat tengah melakukan ziarah keagamaan setelah Bandara Ben Gurion ditutup menyusul memanasnya konflik Israel-Iran pada Jumat (13/6).

“KBRI harus hadir secara aktif membantu pemenuhan kebutuhan WNI yang mungkin terjebak atau kesulitan di wilayah konflik,” ungkap Puan.



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purnito Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmien Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)





FOTO: YGA/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis, (5/06/2025).

Terima Aspirasi Serikat Pekerja Pos

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pekerja untuk menyuarakan keluhan mereka terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan kesejahteraan mereka.

“Kami telah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman serikat pekerja, dan segera akan

kami koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan direksi PT Pos Indonesia,” ujar Dasco, Kamis (5/6) di Senayan, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa perhatian utama yang harus segera diselesaikan adalah penghapusan program pensiun, serta persoalan sistem pengupahan dan pola kerja di lingkungan PT Pos Indonesia.

Salah satu poin krusial yang disuarakan adalah mengenai program pensiun yang sebelumnya sempat berlaku, kemudian dihilangkan, lalu dikembalikan lagi, menciptakan ketidakpastian bagi para penerima.

Selain itu, sistem pengupahan dan pola kerja di PT Pos Indonesia juga menjadi sorotan. Para pekerja menuntut perubahan status dari mitra menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kontrak. “Hal ini menjadi fondasi bagi buruh agar bisa memperoleh hak-hak normatif, seperti tunjangan yang selama ini mereka rasakan belum terpenuhi,” jelasnya.

Tak hanya itu, isu penolakan terhadap penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan.

Legislator Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal bagi DPR untuk mendorong perbaikan tata kelola di badan usaha milik negara (BUMN), khususnya di sektor layanan publik seperti PT Pos Indonesia. [um/rnm](#)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Bahas Temuan dan Tindak Lanjut Kerugian Negara



Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (17/6/2025).

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir bersama sejumlah anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mendalami berbagai temuan hasil pemeriksaan BPK serta meninjau langsung perkembangan tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut di wilayah Jawa Timur.

“Kami hadir hari ini bersama beberapa anggota DPR ke BPK Perwakilan Jawa Timur. Tentunya dalam fungsi pengawasan kami sebagai anggota DPR di masa reses, kami turun dan ingin mendengar serta melihat langsung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kinerja

BPK di daerah,” ujar Adies Kadir di Surabaya, Selasa (17/6).

Dalam pertemuan tersebut, BPK Jawa Timur memaparkan sejumlah temuan, mulai dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), kinerja dinas-dinas, hingga pengawasan terhadap DPRD dan BUMD. Tak hanya itu, diskusi juga membahas sejauh mana potensi kerugian negara yang ditimbulkan serta tindak lanjut penanganannya, termasuk kasus-kasus yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum.

Menurut Adies, masih terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Namun, BPK Jawa Timur telah merancang langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan pada semester kedua tahun ini.

Kami turun dan ingin mendengar serta melihat langsung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kinerja BPK di daerah

“Memang masih ada beberapa kasus yang belum ditindaklanjuti, namun sudah masuk ke dalam daftar semester dua. Rencana pemeriksaan ke depan juga telah mencakup seluruh bidang, seluruh kabupaten/kota, serta seluruh BUMD di wilayah Jawa Timur. Saya pikir kerja BPK Perwakilan Jawa Timur sudah sangat baik,” ujarnya.

azk/aha



Kawal Anggaran Tekan *Stunting* & Kemiskinan



FOTO: UF/PDT

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, saat melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat (20/6/2025).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung program penurunan *stunting* dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dalam dialog bersama masyarakat dan perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Cucun menilai bahwa penguatan kebijakan keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. DPR pun siap memperkuat dari sisi regulasi

dan anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang sedang berlangsung.

“Saat ini adalah momentum penting untuk memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan dan penurunan *stunting* benar-benar berjalan. DPR siap mengawal dari sisi regulasi maupun penganggaran,” ujarnya saat melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat (20/6).

Cucun juga menyoroti berbagai program strategis yang dijalankan oleh Kemendukbangga/BKKBN, mulai dari Kampung KB, penguatan edukasi keluarga, pelibatan masyarakat dan tokoh agama,

hingga Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mulai diimplementasikan di beberapa wilayah.

Lebih jauh, Cucun menyebut bahwa DPR tidak akan berjalan sendiri dalam pengawasan program-program ini. Koordinasi lintas komisi, terutama Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X, akan terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program di lapangan bisa maksimal.

“Program pengentasan kemiskinan dan *stunting* menyentuh banyak sektor: kesehatan, pendidikan, sosial. Maka sinergi antarkomisi dan pemerintah daerah sangat penting. Kita tidak boleh bekerja terpisah-pisah,” jelasnya.

 **uf/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dorong Implementasi Solusi Dua Negara

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendorong implementasi *Two-State*

Solution guna mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

“Kita melihat saat ini dunia baik itu negara Islam, negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Barat seperti Amerika mulai

Konferensi seperti ini tidak boleh berhenti pada retorika semata. Ia menekankan pentingnya menghadirkan langkah konkret seperti demiliterisasi Gaza, pembukaan akses kemanusiaan, serta pengakhiran blokade yang dilakukan Israel terhadap jalur laut dan darat ke wilayah Palestina.

mengakui bahwa tindakan Israel adalah bentuk kejahatan yang sangat keji dan layak dibawa ke ranah hukum internasional,” tegas Rizki, Kamis (12/6).

Menurutnya, langkah yang diambil oleh Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan konferensi internasional mengenai isu Palestina patut diapresiasi. Ia menilai dua negara ini mewakili kekuatan besar dari dunia Barat dan Islam yang berpotensi menciptakan tekanan global terhadap Israel untuk menghentikan kekejamannya.

Ia mengingatkan konferensi seperti ini tidak boleh berhenti pada retorika semata. Ia menekankan pentingnya menghadirkan langkah konkret seperti demiliterisasi Gaza, pembukaan akses kemanusiaan, serta pengakhiran blokade yang dilakukan Israel terhadap jalur laut dan darat ke wilayah Palestina. Mengingat, bantuan kemanusiaan saja selama ini dihalangi dimana kapal-kapal pembawa bantuan dikepung yang dinilainya jelas merupakan pelanggaran berat.

“Nah ini yang harus bisa dibuka dan diberikan solusi dari konferensi ini saya harap bukan hanya semangat retorika nanti yang diberikan di dalam konferensi tersebut tapi sudah masuk ke nilai-nilai praktis permasalahan-permasalahan praktis yang harus bisa diberikan solusi untuk mencapai *two state solution* itu kurang lebih begitu,” pungkasnya.

pun/aha

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah diskusi Dialektika Demokrasi bertema Peta Politik Prancis Arab Saudi di *Two-State Solution*, Redam Konflik Israel Palestina, yang digelar di DPR RI, Kamis (12/6/2025).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO : MRO/PDT

RUU Penyiaran yang Adaptif Era Digital

Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menegaskan RUU Penyiaran menjadi prioritas legislasi yang mendesak untuk diselesaikan karena perkembangan teknologi dan media yang sangat cepat.

“RUU Penyiaran ini sudah masuk ke Prolegnas prioritas Komisi I. Namun sejak diajukan tahun 2012, belum kunjung rampung. Padahal, dunia penyiaran telah berubah drastis—dulu belum ada Netflix, TikTok, hingga *platform Over-The-Top* (OTT) lainnya,” tegasnya di Senayan, Jakarta, Selasa (17/6).

Lebih lanjut, Abraham menyampaikan kekhawatiran

soal potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas khususnya antara KPI, Dewan Pers ‘penyiaran’ menjadi krusial.

“Apabila itu mau dilakukan judulnya harus dirubah RUU penyiaran dan plafon digital atau penyiaran dan konten digital. Kalau enggak, ini kami khawatirkan seperti yang kami sampaikan ada kan akan terjadi tumpang tindih,” tandasnya.

Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, penyiaran konvensional dan platform digital seharusnya diatur dengan pendekatan regulasi yang berbeda.

“Kalau mau mengatur OTT,

sebaiknya dibuat dalam undang-undang terpisah. Seperti di Amerika, TV konvensional diawasi oleh Federal Communications Commission (FCC) sedangkan *platform digital* diawasi oleh lembaga lain. Itu memberikan kejelasan hukum,” usul Abraham.

Menutup pernyataannya, ia menekankan Komisi I DPR tetap berkomitmen menuntaskan RUU Penyiaran ini tanpa membuka celah permainan oknum dan tanpa menimbulkan konflik kelembagaan. Komitmen tersebut, ungkap Abraham, tercermin dari Komisi I DPR RI yang telah menggelar rapat dengan Badan Keahlian baru-baru ini dalam kajian pembentukan lembaga baru. — **pun/aha**



FOTO: MRO/PDT

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Abraham Sridjaja dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mohamad Reza dalam Forum Legislasi di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).





FOTO: DEP/PTI

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat RDP dan RDPU dengan Ketua LPSK dan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Selasa (17/6/2025).

Serap Masukan Perhimpunan Advokat

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai revisi UU KUHAP perlu digulirkan karena membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan zaman sejak diundangkan puluhan tahun silam. Selain itu, agar keberlakuannya dapat bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Januari 2026.

DPR sudah memutuskan RUU KUHAP menjadi RUU usul inisiatif parlemen dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 Februari 2025. RUU KUHAP pun masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan Komisi III DPR RI.

"Intinya kami terbuka kepada seluruh pihak untuk membahas RUU KUHAP, siapa saja silahkan apabila ada masukan bisa disampaikan kepada kami," tuturnya dalam rapat

dengar pendapat umum dengan perhimpunan advokat Indonesia, di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Selasa (17/6).

Sejak memasuki masa sidang setelah reses awal 2025, Komisi III DPR mulai membicarakan RUU tersebut dengan mengundang berbagai narasumber, di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Habiburokhman menyebutkan RUU KUHAP akan mengandung nilai restoratif, restitutif, dan rehabilitatif. Dia menekankan RUU KUHAP akan memaksimalkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian suatu perkara.

"Karena kepentingannya cukup besar maka kami rasa RDPU dimasa reses ini perlu digelar, untuk mempercepat proses pembahasan RUU KUHAP," pungkasnya.

tn/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Revisi KUHAP Prioritaskan Hak Warga



FOTO: JKA/PDT

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman berfoto bersama peserta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari kalangan mahasiswa di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (19/6/2025).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai, KUHAP yang berlaku saat ini belum mampu memberikan keadilan yang seimbang antara negara dan warga negara. Maka dari itu, ia menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap warga negara dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Habiburokhman, proses penyusunan undang-undang selalu melibatkan beragam aspirasi yang tidak selalu sejalan. Dalam situasi itu, ia menilai penting untuk memilah prioritas.

“Yang paling urgen, kurang apa, tidak begitu urgen, dan seterusnya, prioritasnya,” ujar Habiburokhman saat memimpin RDPU di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara

II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/6).

Lebih lanjut, Habiburokhman menyoroti ketimpangan relasi antara negara dan warga dalam sistem hukum acara pidana yang ada. Ia menyatakan bahwa negara yang diwakili oleh penyidik, penuntut, dan hakim terlalu dominan dibanding posisi warga negara yang menjalani proses hukum.

“Kewenangan *State* begitu *powerful*, warga negara begitu *less power*,” tandasnya. Oleh karena itu, Komisi III memprioritaskan penguatan posisi warga negara dalam KUHAP yang baru.

“(Warga) yang tadinya enggak paham hukum harus didampingi oleh kuasa hukum dan kuasa hukum yang tadinya enggak

Negara yang diwakili oleh penyidik, penuntut, dan hakim terlalu dominan dibanding posisi warga negara yang menjalani proses hukum.

berdaya supaya lebih berdaya ketika mendampingi orang yang bermasalah dengan hukum,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam draf KUHAP baru banyak yang dirancang untuk menguatkan hak-hak tersangka, termasuk peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

hal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapannya



Korlantas Diminta Jawab Tantangan Digital

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai transformasi digital di tubuh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebagai langkah penting untuk menjawab persoalan ketertiban lalu lintas di Indonesia. Dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat, ia menyatakan bahwa kualitas suatu negara bisa dilihat dari budaya warganya dalam berlalu lintas.

“Untuk melihat kualitas suatu negara bisa dilihat dari tiga hal, satu di antaranya adalah lihatlah bagaimana mereka di jalan. Jadi kalau kita lihat orang di jalan tertib teratur itu menunjukkan bahwa negara itu memiliki kualitas,” kata Nasir di Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/6), seraya mengutip pemikiran ekonom senior Universitas Indonesia, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Namun, ia menilai situasi lalu lintas di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak pelanggaran dilakukan oleh pengguna jalan, mulai dari mengambil jalur yang tidak semestinya hingga praktik ‘SIM tembak’ yang masih terjadi. Menurut Nasir, kondisi ini mencerminkan perlunya reformasi yang mendalam dalam sistem pelayanan publik, khususnya di bidang lalu lintas.

Nasir juga menyoroti data kecelakaan lalu lintas yang menurutnya terus meningkat secara signifikan. Ia menyebut data dari Korlantas sendiri yang menunjukkan lonjakan jumlah kecelakaan pada 2024.

Menurutnya, kenaikan angka kecelakaan ini tak hanya disebabkan oleh perilaku pengguna jalan, tapi juga ketimpangan antara jumlah kendaraan yang terus masuk ke Indonesia dengan penambahan ruas jalan yang stagnan. Transformasi digital, lanjutnya, harus diarahkan untuk mengatasi kompleksitas itu secara menyeluruh.

“Transformasi atau perubahan rupa ini menjadi penting. Sebab kalau rupanya buruk, takutnya bukan hanya cerminnya yang dibelah, cermin orang lain juga dibelah,” katanya dengan nada mengingatkan.

uc/
rdn

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, saat menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di DPR RI, Kamis (19/6/2025).



Ketahanan Pangan yang Tepat Sasaran



FOTO: TRA/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, saat memimpin kunjungan kerja masa reses Komisi IV DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/6/2025).

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, mendorong pemerintah untuk memastikan agar ketahanan pangan di Sumbar tepat sasaran.

Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Titiek sapaan akrabnya meyakini mampu memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Sumbar khususnya di bidang pertanian, kelautan-perikanan, dan kehutanan.

"Kita sampaikan kepada kementerian terkait agar kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat Sumbar, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan

kehutanan, dapat dipenuhi secara optimal," ujar Titiek saat memimpin kunjungan kerja masa reses Komisi IV DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/6).

Melalui Kunjungan tersebut, politisi fraksi partai Gerindra itu pun berharap ke depannya dapat membangun sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan ramah lingkungan. "Diharapkan dari kunjungan ini Komisi IV DPR RI dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang solutif, aplikatif dan berkelanjutan," imbuh Titiek.

Kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, dan sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI lain diantaranya, Agus Ambo Djiwa (F-PDIP), Alien

Kita sampaikan kepada kementerian terkait agar kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat Sumbar, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, dapat dipenuhi secara optimal

Mus, Ilham pangestu, Eko Wahyudi (F-Golkar), Darori Wonodipuro, Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra), Cindy Monica Salsabila Setiawan, Rajiv (F-Nasdem), Jaelani, Usman Husin (F-PKB), Saadiyah Uluputty, Riyono (F-PKS), dan Herry Dermawan (F-PAN). **tra/aha**



Selamatkan Taman Nasional Tesso Nilo

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan keprihatinannya atas kondisi hutan TNTN yang semakin tergerus. Karena itu, ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung asas keadilan ekologis dan sosial.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan kerusakan ini terus terjadi. TNTN adalah paru-paru Sumatera yang juga menjadi rumah bagi satwa langka seperti gajah dan harimau. Negara harus hadir dengan tegas, tapi tidak boleh semena-mena. Harus adil,” ujar Firman saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Pekanbaru, Riau, Kamis (19/6).

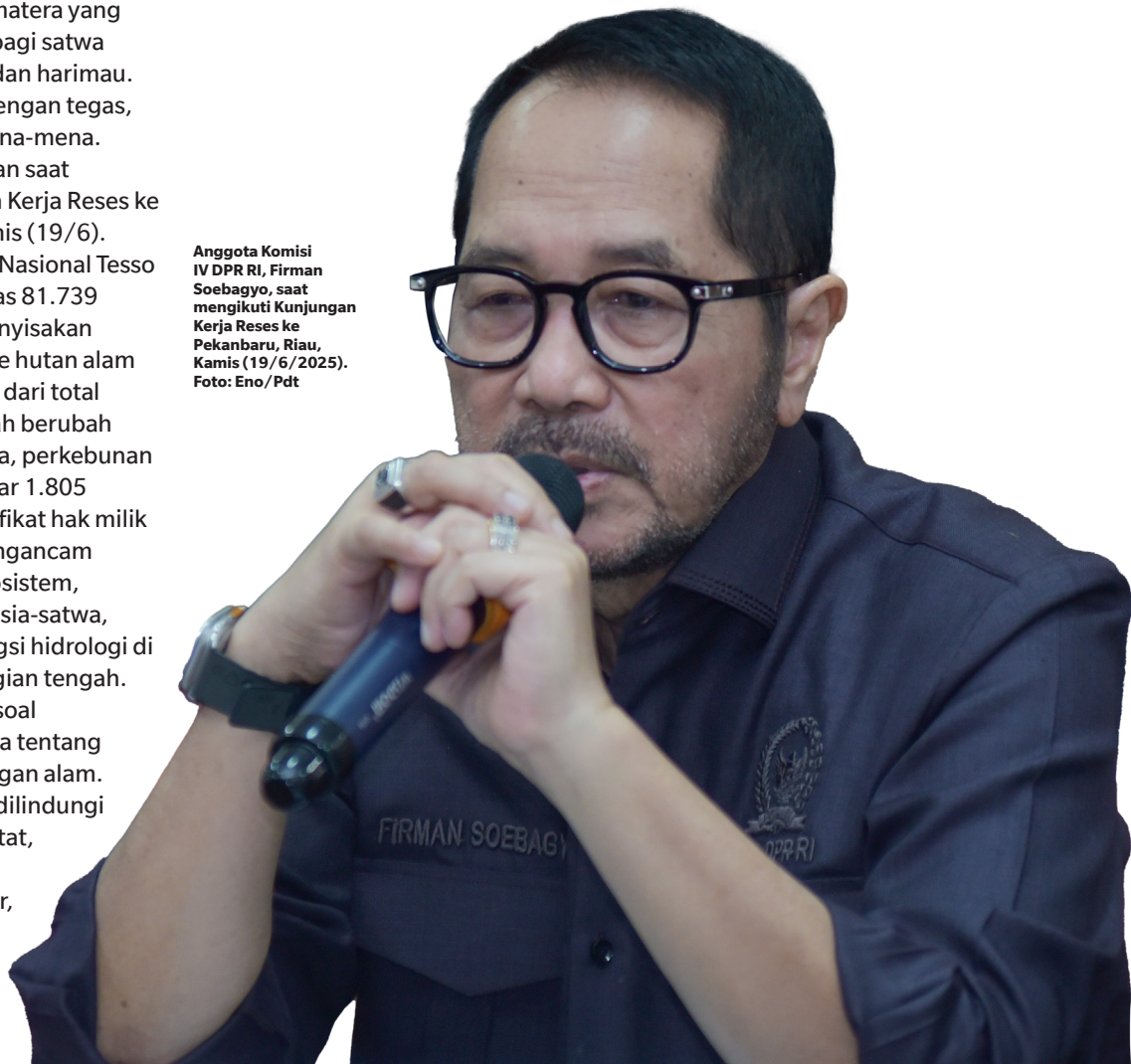
Diketahui, Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki luas 81.739 hektar, kini hanya menyisakan sekitar 12.000 hektare hutan alam atau hanya 14 persen dari total kawasan. Sisanya telah berubah menjadi lahan terbuka, perkebunan sawit ilegal, dan sekitar 1.805 bidang lahan bersertifikat hak milik (SHM). Situasi ini mengancam keberlangsungan ekosistem, memicu konflik manusia-satwa, dan menurunkan fungsi hidrologi di wilayah Sumatera bagian tengah.

“Ini bukan hanya soal perambahan, tapi juga tentang hilangnya keseimbangan alam. Jika dibiarkan, satwa dilindungi akan kehilangan habitat, masyarakat akan kehilangan sumber air, dan kita semua akan kehilangan kekayaan hayati bangsa,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah membentuk Satgas PKH yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), dengan dukungan dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, BPPK, serta Forkopimda Riau.

Firman Soebagyo menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintah, namun mengingatkan bahwa pendekatan tidak boleh semata-mata represif. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menempuh proses legalisasi. — **eno/rdn**

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Pekanbaru, Riau, Kamis (19/6/2025).
Foto: Eno/Pdt



Scan QR untuk berita selengkapnya



Tinjau Infrastruktur Strategis di Riau



FOTO: ICA/PDT

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, saat meninjau Stadion Utama Riau dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Pekanbaru, 19 Juni 2025.

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Riau, untuk meninjau infrastruktur strategis sekaligus merespons berbagai kebutuhan pembangunan daerah, Kamis (19/6).

Kunjungan ini diawali dari Stadion Utama Riau di Pekanbaru, meninjau ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, kemudian dilanjutkan ke Kota Dumai. Hal ini guna melihat langsung kondisi jalan Parit Kitang yang ditujukan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan utama, terutama bagi kendaraan berat.

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengungkapkan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan. Pertama, Stadion Utama Riau menjadi perhatian khusus karena

pasca-Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012, yang mana stadion tersebut tidak lagi

difungsikan secara optimal.

“Stadion ini dulunya venue utama PON 2012. Tapi setelah itu tidak terawat dan tidak difungsikan. Padahal biaya pembangunannya mencapai Rp1,2 triliun. Ini sangat disayangkan. Maka kita berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bisa turun tangan untuk merevitalisasi stadion ini,” ujar Syahrul.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan bahwa revitalisasi stadion juga harus dibarengi dengan pemikiran jangka panjang terkait keberlangsungan dan pemanfaatannya. Mengingat luas kawasan stadion mencapai sekitar 60 hektare, Syahrul mendorong agar dilakukan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengelola stadion beserta kawasannya.

“Tadi ada ide karena lahannya cukup luas, bisa dilakukan KPBU, bukan hanya mengelola stadion utama tapi juga kawasan sekitarnya. Sehingga keberlanjutan stadion ini bisa terjamin,” jelas legislator dari Dapil Riau II tersebut. — **ica/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ratusan Desa di Kaltim Belum Teraliri Listrik



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/6/2025).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya pemerataan akses listrik dan jaringan telekomunikasi di Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke provinsi tersebut, Eko menyampaikan keprihatinan atas masih banyaknya desa yang belum terjangkau layanan dasar dari BUMN, seperti PLN dan Telkom.

"Alhamdulillah, hari ini kami dari Komisi VI DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kenapa kami memilih Kaltim? Karena kami melihat ada 10 kota

dan kabupaten di provinsi ini yang erat kaitannya dengan keberadaan BUMN," ujar Eko Patrio di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/6).

Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat 109 desa di Kalimantan Timur yang belum mendapatkan akses listrik PLN. Selain itu, titik *blank spot* sinyal juga menjadi persoalan serius. "Masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik. Selain itu, banyak daerah juga mengalami *blank spot* dalam hal jaringan internet dan telekomunikasi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi VI pun mengundang para BUMN terkait, seperti PLN dan Telkom, untuk hadir langsung dan

memberikan respon cepat terhadap persoalan tersebut. "Kami ingin agar desa-desa di Kalimantan Timur ini bisa segera ter-cover listrik dan sinyal. Karena kami tidak ingin Kalimantan Timur tertinggal, apalagi di satu sisi kita punya IKN di sini, tapi di sisi lain masih banyak daerah yang tertinggal. Ini ironis," tegasnya.

Eko menambahkan, Komisi VI siap mendukung secara politik maupun anggaran agar persoalan ini bisa segera dituntaskan. "Kami akan membantu dalam hal anggaran dan pengawasan. Kalau memang ada kebutuhan anggaran untuk percepatan akses, kami siap mendukung," pungkas Politisi Fraksi PAN ini. **eki/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



KEK Mandalika Harus Berdampak ke Ekonomi Lokal

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus beri efek positif bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut diungkapkannya usai Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi VI ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengungkapkan para anggota DPR yang hadir dalam Kunres menyampaikan pesan senada soal pentingnya pelibatan pengusaha kecil di sekitar kawasan tersebut. Pelibatan masyarakat lokal itu lanjutnya harus dilakukan sejak dini agar perekonomian masyarakat terangkat.

“Pesan utama dari Bapak/Ibu anggota Komisi VI adalah bagaimana tumbuhnya kawasan pariwisata ini juga harus dibarengi dengan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya pengusaha kecil dan UMKM,” ujarnya kepada *Parlementaria*, di Lombok Tengah, NTB, Kamis (19/6).

Di sisi lain, legislator PDIP itu mengapresiasi *Injourney Tourism Development Cooperation* (ITDC) atas pengelolaan Sirkuit Internasional Mandalika. Sirkuit itu bisa terus terpakai bukan hanya untuk gelaran internasional seperti Moto GP.

Sepanjang tahun 2025 saja, ungkap Adisatrya, Sirkuit Mandalika masih

Anggota DPR yang hadir dalam Kunres menyampaikan pesan senada soal pentingnya pelibatan pengusaha kecil di sekitar kawasan tersebut. Pelibatan masyarakat lokal itu lanjutnya harus dilakukan sejak dini agar perekonomian masyarakat terangkat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi VI di Lombok Tengah, NTB, Kamis (19/6/2025).

diminati oleh banyak pihak dalam menyelenggarakan berbagai agenda. ITDC sendiri juga melakukan agenda rutin bernama Mandalika Series di tahun ini sebanyak empat kali.

“Kami mendapat laporan tadi dari beberapa BUMN *Injourney Group* penggunaan sirkuit Mandalika dari 365 hari setahun ini, 250 hari sudah ter-booking. Jadi ini tentu kemajuan yang sangat-sangat baik,” ucapnya. — **ndn/rdn**



FOTO: NDN/PDT



FOTO: AHA/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga (tengah) saat kunjungan kerja masa reses Komisi VII di Tanjung Selor, Kamis (19/6/2025).

Pariwisata Kaltara Jadi Sumber Ekonomi Baru

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas. Hal ini disampaikannya usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kamis (19/6).

“Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru, baik untuk Kaltara maupun secara nasional,” ujar Lamhot.

Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk

lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

“Komisi VII ingin mendorong agar masyarakat di Kaltara juga diberdayakan menjadi pelaku ekonomi, baik melalui UMKM maupun sektor ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata. Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.

Di sisi lain, Lamhot mengakui bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk mendorong peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk transportasi dan layanan hospitality. **aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ambon: Pusat Ekonomi Kreatif Musik

Komisi VII DPR RI menilai Ambon memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif

berbasis musik. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini saat melakukan kunjungan kerja ke RR Studio Kayu Putih, Ambon, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Maluku.

Menurut Novita, kekayaan bakat dan karya anak-anak muda Ambon merupakan aset nasional yang strategis. Ia menegaskan bahwa ekonomi kreatif berbasis musik tidak

hanya mampu mengangkat nama daerah, tetapi juga bisa menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Potensi kota Ambon ini sangat besar. Selain kekayaan alam, kita punya aset yang luar biasa dari karya-karya anak bangsa, khususnya di bidang musik. Ini bisa menjadi masa depan dan harapan Indonesia,” ujar Novita, Kamis (12/6).

Novita menambahkan, selama ini karya-karya musisi daerah kerap menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan akses produksi,

promosi, hingga persoalan hak cipta. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya kehadiran negara dalam memperkuat kelembagaan dan ekosistem industri musik daerah agar pelaku usaha kreatif mendapat perlindungan dan dukungan yang memadai.

“DPR RI, khususnya Komisi VII, harus hadir untuk melindungi karya anak bangsa. Apalagi kita tahu ada persoalan harmonisasi hak cipta antara pencipta, label, maupun penyanyi yang kadang menghambat perkembangan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Novita juga mengapresiasi peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memfasilitasi pembuatan video klip bagi penyanyi lokal di Ambon. Ia berharap program seperti ini dapat diperluas ke berbagai daerah lainnya agar lebih banyak musisi daerah yang mendapatkan kesempatan serupa. — **hal/aha**



FOTO: HAL/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini saat melakukan kunjungan kerja ke RR Studio Kayu Putih, Ambon.

Pengusaha Tambang Harus Patuh ESG



Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memimpin pertemuan dalam Kunker Reses Komisi XII DPR RI di Jambi, Jumat (20/06/2025).

Komisi XII DPR RI menyoroti pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan pertambangan di Jambi. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) diimbau untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola industri tambang yang berkelanjutan.

“Jadi di dalam pertambangan ada parameter yang harus juga diperhatikan oleh para

penambang, yaitu konsep ESG (*environmental, social, and governance*). Jadi di dalam tiga hal ini kita melihat bagaimana yang sudah berjalan di Jambi,” kata Bambang Patijaya saat wawancara kepada **Parlementaria** di Jambi, Jumat (20/6).

Ia menegaskan bahwa banyak hal yang masih perlu dibenahi dalam industri pertambangan batu bara di Jambi, khususnya terkait kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

“Bagaimana tanggung jawab para perusahaan-perusahaan

tambang pemilik IUP, kepeduliannya terhadap lingkungan. Kemudian kita juga melihat tentang bagaimana *social responsibility*-nya, dan terakhir tentunya terkait dengan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan,” tambah Anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi dan mencermati berbagai persoalan yang muncul di sektor tambang Jambi. Hasil temuan awal dari pertemuan tersebut nantinya akan dibawa dan dibahas dalam rapat Komisi XII setelah masa persidangan dimulai kembali.

mun/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (19/6/2025).

FOTO: HNM/PDT

Minimnya Anggaran Kanwil HAM Kalsel

Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap program kerja dan layanan publik oleh mitra kerja. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun informasi dan data faktual terkait penegakan hukum, pelaksanaan hak asasi manusia, pengelolaan warga binaan

pemasyarakatan, serta persoalan keimigrasian di Kalimantan Selatan.

“Dan data serta temuan dari lapangan ini akan menjadi bahan dalam pembahasan rapat kerja DPR dengan kementerian terkait,” jelas Sugiat kepada **Parlementaria**, Kamis (19/6).

Dalam pertemuan ini, Komisi XIII DPR RI menerima berbagai masukan langsung yang akan diperjuangkan di tingkat pusat. Termasuk soal kendala birokrasi dan keterbatasan anggaran yang masih dihadapi oleh satuan kerja baru hasil pemekaran Kementerian Hukum dan HAM.

“Kementerian HAM di Kalimantan Selatan ini sudah bekerja maksimal walau belum memiliki kantor dan nol anggaran. Ini harus menjadi perhatian serius. Tidak boleh ada pembentukan kelembagaan tanpa dukungan anggaran. Ini bentuk ketidakadilan birokrasi yang harus kita benahi,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Di samping itu, Politisi daerah pemilihan Sumatera Utara III itu memberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah HAM di Kalimantan Selatan yang tetap menjalankan tugas dan fungsinya meskipun hingga saat ini belum memiliki kantor maupun alokasi anggaran yang memadai.

“Ini patut diberikan apresiasi. Karenanya saya menyoroti sekali proses transisi kelembagaan yang ternyata masih ditemui hambatan ini, baik dari sisi administratif maupun dukungan anggaran,” ucap Sugiat. **hnm/rdn**



Dukung Sikap Majelis Rakyat Papua

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pengawasan pelaksanaan fungsi legislasi dan penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya menyoroti perkembangan kasus yang terjadi di wilayah Raja Ampat. Dalam kunjungan ini, sejumlah isu strategis mencuat, salah satunya adalah perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat serta

urgensi evaluasi terhadap perizinan investasi di daerah otonomi baru.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Ia menggarisbawahi bahwa kasus yang terjadi di Raja Ampat menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM dan dampak investasi terhadap masyarakat lokal.

“Berkaitan dengan kasus di Raja Ampat, ada beberapa hal yang

perlu menjadi perhatian, terutama menyangkut hak-hak asasi ekonomi masyarakat dan juga hak asasi manusia yang ada di Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat,” ujar Andreas di Sorong, Kamis (19/6).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini menyatakan bahwa dalam dialog tersebut muncul usulan strategis dari berbagai pihak, termasuk dari Majelis Rakyat Papua, agar Pemerintah Pusat melakukan evaluasi ulang terhadap investasi-investasi yang telah diberikan izin di wilayah Papua Barat Daya.

“Ini menyangkut kepentingan ekonomi dan lingkungan masyarakat, agar mereka tidak hanya menjadi penonton dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah ini. Kita tentu butuh investasi, tetapi jangan sampai masyarakat lokal dirugikan atau terpinggirkan,” tegas Andreas.

— pun/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya dan mitra kerja Komisi XIII DPR RI di Sorong, Kamis (19/6/2025).

Kecam Serangan AS ke Iran

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam

keras tindakan militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Diketahui, serangan tersebut dilakukan melalui operasi gabungan udara dan laut di tengah berlangsungnya perundingan antara Iran dan Uni Eropa di Swiss.

"Tindakan sepihak Amerika Serikat tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional," ungkap Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera dalam keterangan yang dikutip **Parlementaria**, di Jakarta, Senin (23/6).

Sebagai informasi, serangan militer Amerika Serikat ke Iran dilancarkan pada Minggu dini hari, 22 Juni 2025, bertepatan dengan pukul 03.00 waktu setempat. Waktu tersebut sama dengan serangan militer yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Iran.

Lebih lanjut Mardani menjelaskan, kesamaan waktu ini semakin memperkuat kekhawatiran akan terjadinya

konflik berskala regional dan potensi pecahnya perang terbuka di Timur Tengah. Adapun sebelumnya, Amerika Serikat mengungkapkan bahwa militer AS menggunakan enam bom penghancur bunker

GBU-57 secara khusus untuk menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah Fordow milik Iran.

Selain itu, dalam operasi tersebut, Amerika Serikat menyerang Iran dengan kapal selam militer. Setidaknya 30 rudal Tomahawk dijatuhkan ke berbagai target di Iran. Serangan ini, imbuhnya, menjadi pengingat penting bahwa Parlemen di seluruh dunia memiliki peran strategis dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian. — **hal/rdn**

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera.



FOTO: DOK/PDT



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Heriyadi meninjau langsung lokasi penimbunan limbah di kawasan Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/6/2025). Dalam sidaknya, Bambang menyoroti kerusakan ekosistem akibat penimbunan rawa secara ilegal dan meminta Kementerian LHK segera melakukan penyegelan lokasi.
Foto: NAP/AHA



TNP
PARLEMEN

Perempuan Parlemen

SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI
[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvrparlemen.dpr.go.id)



youtube @tvrparlemen



@tvrparlemen



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri